

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada, ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi.

- 1. Pembina** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2. Pengarah** :
 1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM
 2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
 5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- 3. Redaktur/Dewan Redaksi** :
 1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
 2. Firdaus, S.Sos., M.H.
- 4. Tim E-Journal
Journal Manager
Penyunting/Editor** : Fitriyani, S.H., M.Si.
 1. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
 2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
 3. Harison Citrawan, S.H., L.L.M.
- 5. Sekretaris** :
 1. Asmadi, S.H.
 2. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- 4. Tata Usaha** : B. Lora Christyanti, S.IP.
- 5. Teknologi Informasi dan Desain Layout** :
 1. Machyudhie, S.T.
 2. Agus Priyatna, S.Kom.
 3. Harysandi Permana, S. Kom
- 6. Mitra Bebestari** :
 1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.
(Universitas Hasanuddin/Hukum Perdata/ Agraria, Kelautan)
 2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.
(Universitas Atma Jaya/ Sosiologi Hukum)
 3. Dr. Ani Purwanti, S.H, M.Hum.
(Universitas Diponegoro/Hukum)
 4. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
(Universitas Indonesia/Hukum Pidana/HAM)
 5. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H.
(Universitas Airlangga/HTN/HAM)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan PT. Pohon Cahaya

Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix

Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia (HAM) (<i>Death Penalty for Terrorism Offence in Indonesia: Testing Strategic and Human Rights Perspective</i>)	127-144
Prakoso Permono	

Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (<i>Classification of Decriminalization in Law Enforcement in Indonesia</i>)	145-160
Duwi Handoko	

Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta (<i>To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta</i>)	161-178
Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto	

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia (<i>State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia</i>)	179-194
Disca Betty Viviansari; Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari	

Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (<i>Handling of Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province</i>)	195-216
Penny Naluria Utami	

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (<i>Human Rights View of Land Acquisition For Public Interest Development</i>)	217-232
--	---------

Agus Suntoro

Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa

(Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective) 233-248

Dedi Sahputra

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting

(Enforcement Of Human Rights Law For Children With Stunting) 249-260

Tuti Haryanti, Nurhayati

BIODATA PENULIS xvii

PEDOMAN PENULISAN xxi

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di penghujung tahun 2019 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2 Desember 2019. Seperti penerbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesepuluh dimuat 8 (delapan) tulisan karya-karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 10 Nomor 2 Desember Tahun 2019, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang mengulas beragam isu HAM pada berbagai aspek, yaitu hukuman mati, dekriminialisasi, hak politik, pendidikan, perdagangan orang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, anak dan komunikasi massa, dan permasalahan stunting. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan Open Jurnal System maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2019

Redaksi

KOSONG

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRABEBESTARI

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bebestari yang telah mereview artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 10, Nomor 2, Edisi Desember 2019. Mitra bebestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin/Hukum Perdata/Agraria/Kelautan)
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Universitas Atma Jaya/ Sosiologi Hukum)
3. Dr. Ani Purwanti, S.H, M.Hum. (Universitas Diponegoro/Hukum Kebijakan Publik-Hukum dan Wanita-Hukum dan Masyarakat)
4. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (Universitas Indonesia/Hukum Pidana/HAM)
5. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H. (Universitas Airlangga/HTN/HAM)

KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge

Prakoso Permono

Death Penalty for Terrorism Offence in Indonesia: Testing Strategic and Human Rights Perspective

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 127 - 144

The death penalty for terrorism offences in Indonesia has always been a contentious debate on various occasions. Indonesian government has executed six death sentences on terrorism offences, from hijacking of Garuda Woyla Airplane by Komando Jihad network to trio of 1st Bali Bombing. Indonesian government has sentenced death penalty for Aman Abdurrahman and currently in waiting period before the sentence carried out. This policy not only become debatable but also unfortunately has not yet involved strategic studies and impact analysis on this phenomenon. This research as already mentioned in research problem statement seeks to explore human rights perspective that tested with strategic perspective in death penalty issues and also considerations for policy maker before implementing death penalty for terrorism convict. The method used in this research is qualitative method with critical literature study with a multidisciplinary approach. Conclusion of this study is that there is retaliation potential as strategic challenge to this policy, although the strategic and human right fulfillment threats will always be a threat to this policy. Finally, this reseach recommends to make a comprehensive consideration before executing terrorist convict considering potential threats that will continue to exist regardless of sentencing death penalty or not for terrorism offence.

Keywords: death penalty; terrorism convict; human right; retaliation.

Duwi Handoko

Classification of Decriminalization in Law Enforcement in Indonesia

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 145 - 160

This study focuses on the study of periodization and classification of decriminalization in the Criminal Code with the technique of collecting data in library studies. The type of data used in this study is secondary data presented qualitatively. Decriminalization of offenses in the Criminal Code in the post-reform period had very significant differences with decriminalization in the period before reform. After the reformation, an institution was established that has the authority to decriminalize offenses, both offenses contained in the Criminal Code and offenses that are outside the Criminal Code. There are four classifications of decriminalization in law enforcement in Indonesia, namely non-pure decriminalization, pure decriminalization, partial pure decriminalization and conditional decriminalization. Not pure means that an offense is still valid and has legal force. Pure means that an offense is not valid and has no legal force (illegal or illegal). Pure part means that an offense is still valid and still has legal force (legal) against the elements of criminal acts that are still valid. Conditional means confirming certain conditions in terms of the validity of an offense legally.

Keywords: decriminalization of offenses in the criminal code; non-pure decriminalization; pure decriminalization; partial pure decriminalization; conditional decriminalization.

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto

To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 161 - 178

One of the rights that must be fulfilled by the government is the rights to vote and to be voted as the implementation of ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The role of government in political rights in general is passive, but to fulfill political rights for disability groups is a special matter. This paper aims to give an overview and a critical analysis about the implementation of the political rights of disability groups, and to get a clearer description regarding the obstacles in fulfilling their political rights. This research is a qualitative research by collecting primary data from related stakeholders in Yogyakarta through in-depth interviews to find out more deeply about the fulfillment and obstacles to the fulfillment of political rights of disability groups. In this paper, it is revealed that there are potential regulations that apply in Indonesia to eliminate the political rights of disability groups, but also found that in the implementation of technical elections there are also obstacles that make disability groups unable to fulfill their political rights in the election. Therefore, a comprehensive step is needed by the government to guarantee the political rights of disability groups.

Keywords : human rights; disability; political rights; election.

Disca Betty Viviansari

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari

State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 179 - 194

International Legal Instruments and Legislation have regulated the fulfillment of the right to education for Indonesian migrant worker's children in Malaysia. However, the existence of policies that were absent from Indonesia and Malaysia caused problems regarding the fulfillment of the right to education must be resolved. The type of research used in this study is doctrinal research with conceptual and statue approach from the standpoint of human rights. This research shows that the problem of the Indonesian migran worker's children in Malaysia is a complex problem. So, that fulfillment of the right to education for Indonesian migran worker's children in Malaysia is a joint responsibility of both Indonesia and Malaysia that must be resolved immediately.

Keywords : rights to education; Indonesian migran worker's children; human rights

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Penny Naluria Utami

Handling of Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 195 - 216

Every province in Indonesia is both the origin and destination of trafficking in persons and at the end of 2017, East Nusa Tenggara (NTT) occupies the top position as a region that experiences cases of trafficking in persons. The inclusion of NTT in the red zone of trafficking in persons is quite surprising. Previously, NTT was not included in the ranking of regions affected by trafficking problems. By using a qualitative approach that is described descriptively so that the object or subject can be described as it is then analyzed in order to get a comprehensive report from the point of view of human rights. Data collection techniques in the form of literature study and interviews using purposive sampling. In conclusion, the handling of cases of Criminal Trafficking in Persons is complex, where the handling requires a comprehensive mapping and is only oriented to eradicating and punishing perpetrators without being oriented to the handling and empowerment of victims. The obstacles can be seen from the side of the government where there are still lacking and diverse understanding of stakeholders about existing policies, unequal capacity and capability of stakeholders in the regions, and the lack of coordination among relevant stakeholders. As for the community, there is still a high motivation to migrate to cities or abroad in search of a better life, a consumptive lifestyle among adolescents, a desire to get money quickly, and a lack of public understanding of the dangers of Trafficking in Persons which results in the community being easily fooled by offer irresponsible parties.

Keywords: *handling; trafficking in persons; provincial government.*

Agus Suntoro

Human Rights View of Land Acquisition For Public Interest Development

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 217 - 234

The existence of Law Number 2 year 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Development gives the legitimation and support for speeding up the infrastructure development that massively done by the government. Although, empirically there are some implication that intersect with human rights especially on land acquisition aspect. The denunciation data from Komnas HAM that related to this matter are being used as the indicator. Therefore, this research is concluded to know the norms in UU No. 2/2012 from human right's perspective according to the human right's instruments and principles, including the corporates' responsibility as the developers. This research uses the qualitative method and descriptive approach. Data that used in this research is primary data that collected by doing interview with the victims, government, and the experts, whilst the secondary data are from some literatures. The outcome of this research tell that the human rights are not being the main reference especially on (a) the scope and the definition of public interest so it affects the object acquisition being so wide; (b) reduction of the meaning and the substantiation of land acquisition; (c) institutional case and the appraisal that affecting the amount of compensation; (d) the uphold of formal procedure through the adjudication of citizen who want to defend their rights.

Keywords: *land acquisition; infrastructure development; public interest; human rights.*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

Dedi Sahputra

Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 235 - 250

*The enactment of Press Council Regulation No.1/Regulation-DP/II/2019 concerning Guidelines for Child Friendly News (PPRA) for printed, online/cyber and terrestrial media on February 9, 2019, mass media in Indonesia experienced changes in the relevant press law with the rights of the child related to the age limit of children in conflict with the law. The purpose of this study is to analyze the protection of children's rights through the application of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA) specifically Article 1 points 3, 4, 5 regarding the age limit of children from mass communication perspective. The SPPA Law is derived in the form of PPRA for printed, online/cyber and terrestrial media in Indonesia in relation to press freedom which is accommodated in Press Law No. 40 of 1999. This study uses qualitative methods by presenting data descriptively. The study found that the application of Law Number 11 of 2012 concerning SPPA which was derived in the form of PPRA for printed, online/cyber and terrestrial media in Indonesia had the consequence that Law No. 40 of 1999 was not *lex specialis* and journalistic products that violating the laws and regulations can be punished.*

Keywords: *the rights of the child; news; mass communication.*

Tuti Haryanti

Enforcement Of Human Rights Law For Children With Stunting

Human Rights Journal, Vol. 10, Number 2, Desember 2019, page 251 - 262

Stunting is a chronic nutritional problem that has an impact on children's health and the country's economy. The government has tried to reduce stunting as a mandate of the constitution, but Indonesia is still among the third countries with the highest prevalence of stunting in the world. This study aims to analyze the views of human rights for children with stunting and formulate efforts to uphold human rights against the problem of stunting. The type of research used is normative legal research. The legal materials collected was analyzed qualitatively by explaining the existing theories logically, systematically to get significant and scientific results. The results of the study showed that the high prevalence of stunting as evidence of government failure in law enforcement against the problem of malnutrition. Ignoring children's rights is a form of human rights violations committed by the state. Need to regulate the law related to stunting as a manifestation of state responsibility in upholding children's rights. Prevention and handling of stunting is carried out holistically in various sectors with commitment and synergy between the central / regional government, parents, family and community.

Keywords: *law enforcement; human right; stunting.*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Prakoso Permono (Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia)

Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 127-144

Hukuman mati pada terpidana kasus terorisme selalu menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjalankan hukuman mati pada enam terpidana terorisme mulai dari pembajakan pesawat Garuda Woyla oleh jaringan Komando Jihad hingga trio terpidana mati kasus Bom Bali 1. Saat ini pemerintah menetapkan Aman Abdurrahman dalam masa tunggu sebelum proses eksekusi mati dilaksanakan. Kebijakan ini selain mendatangkan berbagai perdebatan sayangnya juga belum melibatkan kajian strategik dan analisis dampak. Tujuan penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah ialah untuk membahas perspektif strategik dan hak asasi manusia dalam penjatuhannya hukuman mati terpidana terorisme di Indonesia dan pertimbangan pengambilan keputusan penjatuhannya hukuman mati berdasarkan dua perspektif tersebut termasuk potensi tantangan yang ditimbulkan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan kritis dengan pendekatan multidisipliner. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat potensi retaliasi sebagai tantangan strategik pada kebijakan hukuman mati terpidana terorisme, sekalipun potensi ancaman strategik dan pemenuhan hak asasi manusia akan tetap ada sekalipun kebijakan hukuman mati tidak dijatuhkan. Oleh sebab itu hasil penelitian ini memberi masukan agar dilakukan pertimbangan yang komprehensif perlu dilakukan sebelum eksekusi mati terpidana terorisme dilaksanakan mengingat potensi ancaman yang akan terus ada terlepas dari kebijakan hukuman mati ataupun tidak menjatuhkan hukuman mati.

Kata kunci: hukuman mati; terpidana terorisme; hak asasi manusia; retaliasi.

Duwi Handoko (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru)

Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 145-160

Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai periodisasi dan klasifikasi dekriminialisasi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan secara kualitatif. Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode setelah reformasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan dekriminialisasi pada periode sebelum reformasi. Setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekriminialisasi terhadap delik, baik delik yang terdapat di dalam KUHP maupun delik yang terdapat di luar KUHP. Terdapat empat klasifikasi dekriminialisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu dekriminialisasi bukan murni, dekriminialisasi murni, dekriminialisasi murni sebahagian, dan dekriminialisasi bersyarat. Bukan murni berarti suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (legal). Murni berarti suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah). Murni sebahagian berarti suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum (legal atau sah) terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Bersyarat berarti menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.

Kata Kunci: dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP; dekriminialisasi bukan murni; dekriminialisasi murni; dekriminialisasi murni sebahagian; dekriminialisasi bersyarat.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 161-178

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihwal yang khusus. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan hak politik kelompok disabilitas, dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari stakeholder terkait di Yogyakarta melalui wawancara mendalam untuk mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan dan hambatan pemenuhan hak politik kelompok disabilitas. Dalam tulisan ini terungkap bahwa ada potensi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menghilangkan hak politik penyandang disabilitas, selain itu juga didapati dalam pelaksanaan teknis Pemilu masih didapati pula hambatan yang membuat kelompok disabilitas tidak bisa menunaikan hak politiknya dalam Pemilu. Oleh karena diperlukan langkah komprehensif oleh pemerintah untuk menjamin hak politik kelompok disabilitas.

Kata Kunci: hak politik; penyandang disabilitas; pemilu.

Disca Betty Viviansari (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 179-194

Instrumen Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pemenuhan hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia di Malaysia. Namun, adanya kebijakan yang absen dari Indonesia dan Malaysia menyebabkan permasalahan mengenai pemenuhan hak atas pendidikan masih menjadi polemik untuk segera diselesaikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal research dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan anak buruh migran Indonesia di Malaysia adalah masalah yang kompleks. Sehingga pemenuhan hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia di Malaysia adalah tanggung jawab bersama kedua belah negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang harus segera diselesaikan.

Kata Kunci: hak atas pendidikan; anak buruh migran; hak asasi manusia.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Penny Naluria Utami (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 195-216

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang dan akhir tahun 2017, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan orang merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat daerah yang terdampak masalah perdagangan orang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif sehingga objek atau subjek dapat digambarkan sesuai apa adanya kemudian dianalisis guna mendapatkan laporan yang komprehensif dari sudut pandang hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan purposive sampling. Kesimpulannya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersifat kompleks, dimana penanganannya memerlukan pemetaan yang komprehensif dan hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa berorientasi pada penanganan dan pemberdayaan korban. Hambatannya dapat dilihat dari sisi pemerintah dimana masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Adapun dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya TPPO yang mengakibatkan masyarakat mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: penanganan; perdagangan orang; pemerintah provinsi.

Agus Suntoro (Komnas HAM RI)

Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 217-234

Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, secara empiris terdapat implikasi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia terutama dalam aspek pengadaan tanah. Data pengaduan di Komnas HAM terkait kasus infrastruktur menjadi indikasi akan persoalan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat norma-norma yang terkandung dalam UU No. 2/2012 dari perspektif HAM dengan mendasarkan pada instrumen dan prinsip hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab dengan korporasi/ BUMN selaku pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terarah terhadap korban, pemerintah dan ahli, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan norma hak asasi manusia belum menjadi rujukan terutama menyangkut (a) persoalan ruang lingkup dan definisi kepentingan umum sehingga objek pengadaan menjadi sangat luas; (b) reduksi terhadap makna dan substansi musyawarah dalam pengadaan tanah; (c) persoalan kelembagaan dan hasil penilaian oleh appraisal yang mempengaruhi ganti kerugian; (d) menguatnya prosedur formal melalui pengadilan bagi warga yang mempertahankan hak-haknya.

Kata kunci: pengadaan lahan; pembangunan infrastruktur; kepentingan umum; hak asasi manusia.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya****Dedi Sahputra (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan)****Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa**

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 235-250

Diberlakukannya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) bagi media massa cetak, media massa online/siber dan media masa terestrial pada tanggal 9 Februari 2019, media massa di Indonesia mengalami perubahan dalam hal hukum pers menyangkut hak-hak anak terkait batas usia anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak-hak anak melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa. Undang-Undang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, media massa online/siber di Indonesia dalam kaitannya dengan kebebasan pers yang diakomodir dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan data-data secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, online/siber dan terestrial di Indonesia memiliki konsekuensi bahwa Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai *lex specialis* dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

Kata Kunci: hak-hak anak; berita; komunikasi massa.**Tuti Haryanti (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon)****Nurhayati (Fakultas Hukum Universitas Tadulako)****Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita *Stunting***

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hal 251-262

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Pemerintah telah berupaya mengurangi *stunting* sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi *stunting* di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita *stunting* dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah *stunting*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalansi *stunting* sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk. Mengabaikan hak anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Perlu pengaturan hukum terkait *stunting* sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. Pencegahan dan penanganan *stunting* dilakukan secara holistik dalam berbagai sektor dengan komitmen dan sinergisitas antara pemerintah pusat/daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : penegakan hukum; hak asasi manusia; *stunting*.